

Catatan Diskusi "Pengalaman Penerapan Keadaan Darurat"

(Jakarta, 7 Januari 2004)

Perkembangan situasi di sejumlah daerah konflik menjelang Pemilu 2004 kian memprihatinkan dan bukan tak mungkin bakal mendelegitimasi hasil Pemilu. Aceh, misalnya, diberitakan bahwa dari 4.044.097 penduduk Nanggroe Aceh Darussalam, itu 51,1% terkena gangguan kejiwaan. 25,7% dari mereka mengalami depresi berat, 18,4% mengalami gangguan panik. Artinya, akan muncul tanda tanya besar bagaimana ketika orang sedang mengalami depresi, bahkan mengalami gangguan kepanikan, Pemilu bisa digelar secara rahasia, jujur dan jurdil.

Di Indonesia saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 1,5 juta IDPs (*internally displaced persons*) yang tidak diakui oleh dunia internasional sebagai *refugees*. Biaya besar harus dikeluarkan pemerintah RI untuk menghidupi mereka. Belum lagi arus mobilitas mereka dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini akan menyulitkan pelaksanaan Pemilu mendatang.

"Kita bisa melihat apa yang terjadi di Aceh. Pada enam bulan pertama darurat militer, angka untuk mengukur keberhasilan adalah jumlah orang yang ditangkap dan jumlah senjata yang mampu dikumpulkan. Tapi proses itu segera bergeser ke ukuran-ukuran yang lain, misalnya seberapa besar Pemilu dapat sukses di Aceh atau tidak," ujar Munir. Hal ini, menurutnya, akan menyulitkan pelaksanaan Pemilu di kawasan ini.

"Saya yakin 100 persen tidak akan terjadi akan muncul konflik-konflik seperti di daerah lain pada masa Pemilu. Yang terjadi adalah munculnya kekerasan yang membangun ketakutan yang dominan yang kemudian mendorong proses mobilisasi partisipasi politik masyarakat Aceh. Saya yakin betul angka partisipasi politik di Aceh tahun ini paling tinggi di Indonesia kalau di jumlah dari prosentasi penduduk yang menggunakan hak suara. Karena, sekarang ini orang datang ke pemilu di Aceh itu soal setia NKRI atau tidak. Kehadiran menggunakan hak suara sekarang, akan sangat tentukan KTP merah putih atau tidak. Ini sebetulnya susahya negeri transisi yang tidak beres-beres," tukas Munir. Karena itulah Munir mengkuatirkan jangsan-jangsan darurat militer akan dinilai sukses berdasar kemampuan memobilisir angka partisipasi politik masyarakat Aceh.

Sedangkan Dr. Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI yang sering melakukan penelitian di Papua yakin bahwa kawasan ini akan tetap kondusif pada saat menjelang Pemilu 2004. "Walau pun pada Oktober 2003 lalu, ada suatu pengiriman empat batalyon ke Papua untuk menjaga wilayah perbatasan dan juga wilayah sekitar strategis dan juga wilayah Jayapura yang lain, darurat militer itu tidak akan diberlakukan di Papua," ujarnya. Ada beberapa lain, yaitu TNI tak memiliki kapabilitas untuk dikirimkan pasukannya ke Papua sebagai wilayah darurat militer yang baru. Kekuatan TNI sangat terbatas apalagi menjelang Pemilu 2004 ini. "Pasukan TNI akan tersebar ke hampir seluruh propinsi di Indonesia dan karena itu kekuasaannya tentunya tidak akan begitu kuat untuk diterapkan darurat militer di lebih dari satu propinsi," ujar Ikrar. Selain itu, juga karena rakyat Papua sudah trauma dengan konflik dan juga operasi militer.

Sedangkan Dr. George Junus Aditjondro yang selama 1 tahun terakhir melakukan penelitian di wilayah Poso, Sulawesi, merasa yakin bahwa menjelang Pemilu 2004 situasi tak bakal mereda. "Sebagaimana sejumlah daerah konflik lainnya di wuilayah nusantara ini, ada banyak kelompok kepentingan yang ikut bermain. Dan konflik yang terjadi lebih merupakan perselingkuhan 3M yaitu modal, militer dan paramiliter," ujar George sambil menyebut nama sejumlah pejabat dan pengusaha yang memiliki kaitan dengan konflik Poso yang tak kunjung usai.***.